

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat maupun daerah wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Dalam pelaksanaannya wajib menerapkan standar akuntansi yang baik, handal dan akuntabel. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran APBN/APBD, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Na'im dan Rakhman, 2000) dalam (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2010). *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. *Voluntary disclosure* merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Beberapa pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang harus dibuat oleh pemerintah. Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi akan mencerminkan kualitas, manfaat dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri (Suhardjanto, Rusmin, dan Brown 2010) dalam (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah telah mentaati SAP dan laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan (BAPEPAM, 2003).

Pengukuran terhadap suatu daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan dan pengelolaannya (Suhardjanto, Rusmin, dan Brown 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi.

Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Suatu pengukuran kinerja yang didasarkan atas karakteristik operasional antara lain bermanfaat untuk mengkuantifikasi tingkat efisiensi dan efektifitas suatu pelaksanaan kegiatan. DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Umur administratif pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tahunan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan hasil evaluasinya akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya. Anggaran digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kekayaan pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga, 2011). Kekayaan pemda diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu, 2005) dalam (Setyaningrum dan Syahfitri, 2012), sehingga, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pembagian departemen fungsional dipresentasikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan pemda. Semakin banyaknya jumlah SKPD maka semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan (Hilmi 2011) dalam ((Setyaningrum dan Syahfitri 2012)

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi akan lebih mudah dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga laporan keuangannya menyajikan informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan (Patrick 2007) dalam (Setyaningrum dan Syahfitri 2012).

Untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat diperlukan adanya rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan pengungkapan wajib pada laporan keuangannya (Dwirandra 2008) dalam (Setyaningrum dan Syahfitri 2012)

Di Indonesia, *intergovernmental revenue* dikenal dengan sebutan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (Cahyat, 2004)

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan *intergovernmental revenue* memiliki peran yang penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka berbagai upaya dilakukan agar Provinsi Jawa Timur dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sehingga tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance* di Provinsi Jawa Timur dapat tercapai.

Penelitian ini akan menguji secara komprehensif karakteristik pemerintah daerah yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD. Penelitian ini mengacu pada penelitian Setyaningrum dan Syahfitri (2012). Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian Setyaningrum dan Syahfitri (2012) yaitu LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009

sedangkan objek penelitian pada penelitian ini yaitu LKPD provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah umur administratif pemerintah daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Diferensiasi Fungsional berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah spesialisasi pekerjaan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
7. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
8. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh ukuran legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Pengaruh kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Pengaruh Diferensiasi Fungsional terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Pengaruh spesialisasi pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. **Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai referensi untuk penelitian sektor publik selanjutnya terkhusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. **Bagi Instansi Pemerintah Daerah**

Memberikan informasi dan pertimbangan dalam evaluasi terhadap perkembangan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah

3. **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam mengetahui tingkat

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan *good governance*

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab tinjauan pustaka berisi telaah teori dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian berisi desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variable penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV: DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab data dan pembahasan berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran.